

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan diseluruh dunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang semakin berkembang dalam bisnisnya. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan salah satu fokus tujuan utama dari perusahaan yang dapat terlihat dari harga pasar saham perusahaan tersebut. Persaingan yang ketat antar perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan masing-masing. Tujuan utama perusahaan meningkatkan kinerja adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. (Muhatir dan Andy, 2019)

Nilai perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan saat ini serta dapat menggambarkan prospek perusahaan di masa mendatang. Sehingga nilai perusahaan dianggap mampu mempengaruhi penilaian para investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan dapat berupa nilai aset dan keahlian manajemen dalam mengelola perusahaan. Salah satu aset perusahaan yaitu saham yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal jangka panjang. (Muhatir dan Andy, 2019).

Menurut Forum *for Corporate Governance* Indonesia (FCGI) dalam publikasinya yang mempergunakan definisi dari Cadbury Comittee dari United Kingdom tahun 1992, *corporate governance* yaitu seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan kepentingan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Di samping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dalam pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan (Mardikanto, 2018). Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*Stakeholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*Stakeholders*). CSR saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. (Sugeng Santoso, 2021)

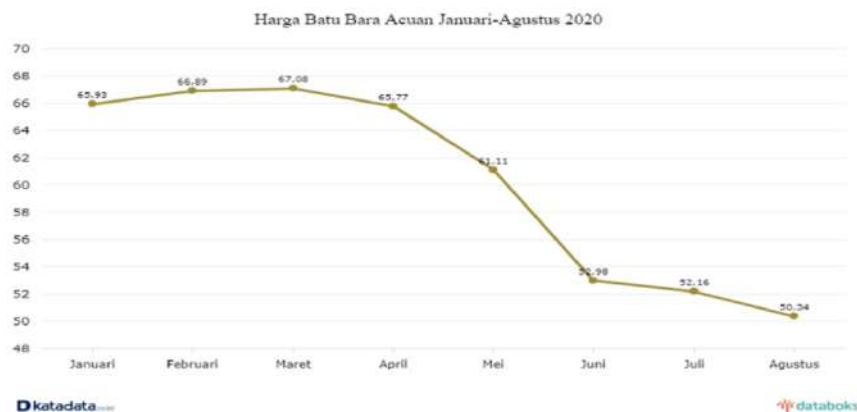
Fenomena kasus perusahaan pertambangan yang mengalami penurunan jumlah laba sehingga berpengaruh terhadap penurunan nilai perusahaan dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan, salah satunya pada tahun 2020 yakni

selama pandemi Covid-19 menghantam mengakibatkan hampir seluruh emiten sektor pertambangan, khususnya yang bergerak di sektor batu bara yang telah mempublikasikan laporan keuangan semester I 2020 nilai perusahaan menurun. Hal ini mengakibatkan turunnya permintaan di beberapa negara pengimpor batu bara, sedangkan stok batu bara di pasar global meningkat dalam lima bulan terakhir. Harga batu bara mengalami tren menurun sejak World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada pertengahan Maret 2020 lalu. Adapun harga batu bara acuan Indonesia periode Juli 2020 sebesar US\$ 52,16 per ton. Angka ini turun tipis US\$ 0,82 dari harga batu bara acuan Juni 2020 yang sebesar US\$ 52,98 per ton. Dilanjutkan, pada Agustus 2020 tercatat sebesar US\$ 50,34 per ton, turun 3,5% dari bulan sebelumnya (cnbcindonesia.com, 2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Katadata.co.id melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) misalnya membukukan pendapatan bersih sebesar US\$ 652,62 juta atau setara Rp 9,52 triliun pada semester I 2020. Jumlah ini turun 26,89% yoy dari sebesar US\$ 892,70 juta pada semester I 2019. Alhasil laba bersih perusahaan berkode emiten ITMG ini turun lebih dari 50% menjadi US\$ 29,8 juta dari sebelumnya sebesar US\$ 70,8 juta per Juni 2019. kinerja emiten batu bara rata-rata mengalami penurunan pendapatan maupun laba bersih mulai dari 20% hingga lebih dari 50% secara tahunan atau year on year (yoy) pada semester I, bahkan hingga jatuh merugi pada semester II akibat pandemi dan turunnya harga batu bara.

Gambar 1.1

Penurunan Harga Batu Bara Acuan Januari-Agustus 2020



Sumber: Kementerian ESDM 2020

Fenomena yang memperlihatkan masalah penurunan nilai perusahaan juga dapat terjadi karena menurunnya kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan. Salah satunya dari faktor lingkungan dan tanggung jawab social perusahaan yang kurang baik. Contoh fenomena salah satu perusahaan pertambangan yang sudah terjadi pada 2006 silam, yaitu pada kasus PT. Lapindo Brantas Inc yang melakukan kelalaian dalam pengeboran minyak dan gas bumi di Sidoarjo dan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan mengakibatkan menurunnya harga saham PT. Energi Mega Persada Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT. Lapindo Brantas Inc hingga tahun 2018 (finance.yahoo.com, 2018).

Maureen dan Indah (2017) berpendapat bahwa mekanisme *good corporate governance* yang berperan penting antara lain yaitu struktur kepemilikan dan komite audit. Struktur kepemilikan yang dimaksud ada 2 yaitu kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial. Selain itu struktur

kepemilikan diatas dapat meminimalisasi *conflict agency* yang sering terjadi di perusahaan, dimana pemegang saham sebagai pengendali atas perusahaan dalam mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham bukan untuk kepentingan manajemen dan golongan tertentu. Komite audit juga mempunyai peran penting dalam penerapan *Corporate Governance* yang baik dimana tanggung jawabnya adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga melakukan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amaliyah dan Eliada Herwiyanti (2019). Berpendapat bahwa dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memonitoring manajer yang terdapat dalam perusahaan supaya efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila perusahaan menerapkan sistem *Good Corporate Governance* diharapkan nilai perusahaan akan tercapai.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah (2018). Berpendapat bahwa Pengungkapan CSR sebuah perusahaan belum tentu dapat meningkatkan nilai perusahaannya dan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR belum tentu memiliki nilai perusahaan yang rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yulianti (2019) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak CSR memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara langsung ikut aktif dalam pengambilan keputusan (Kasmir, 2016). Adanya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menciptakan nilai perusahaan yang tinggi (Hidayat et al., 2021).

Lestari (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa ditemukan oleh Marhamah (2021) yang menemukan semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Zulaikha (2021) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hasil berbeda juga di temukan oleh Paramitha dan Ceacilia (2022) yaitu kepemilikan manajerial tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hidayat et.al. (2021) selanjutnya juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Nuryono, (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Kustiono dan Sherin (2020) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hasil berbeda ditemukan oleh Amaliyah dan Herwiyanti

(2019) yaitu kepemilikan institusional tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain kepemilikan Instisional terdapat juga dewan komisaris independen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun penjelasannya tentang dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Gusti, 2016).

Rahmawati, (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa ditemukan oleh Magdalena, (2022) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda ditemukan Amaliyah dan Herwiyanti, (2019) dan Nuryono, (2019) yaitu dewan komisaris independen tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Saputri dan Isbanah, (2021) juga menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai dari perusahaan.

Selain itu variabel lain yang dapat meningkatkan suatu nilai perusahaan adalah dengan adanya komite audit, dikarenakan komite audit juga mempunyai peran dalam penerapan *good corporate governance* yang baik dimana tanggung jawab komite audit yaitu memberikan kepastian bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undangundang dan peraturan yang berlaku juga melakukan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan (Mauren dan Indah, 2017). Saputri dan Isbanah, (2021) Menyatakan bahwa Komite audit

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil berbeda ditemukan oleh (Maureen dan Indah 2017) dan (Juliawan 2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Selain itu terdapat juga *corporate Social Responsibility* yang dapat mempengaruhi meningkatnya suatu nilai pada suatu perusahaan. Kinerja lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Untung, 2021). Semakin baik pertanggung jawaban perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar perusahaan maka citra perusahaan akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan telah memenuhi kontrak sosial atau legitimasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Banyak investor lebih berminat terhadap perusahaan yang memiliki citra atau image yang baik di masyarakat, karena tingginya loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan atau profit bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hidayat et.al., 2021).

Annisa Devi lestari dan zulaika (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda di temukan oleh Rizky dan Cecilia (2022) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022)?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022)?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022)?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022).

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022).
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022).
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022).
5. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2020 – 2022).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat bagi investor Memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan GCG dan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan pertimbangan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.
2. Manfaat bagi masyarakat memberikan informasi mengenai pentingnya perusahaan menerapkan GCG dan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, sehingga masyarakat tau akan hak-hak social dan lingkungan yang diperoleh didalam perusahaan.

3. Manfaat bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian tentang pengaruh GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principle*) dan manajemen (*agent*). Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Masalah keagenan muncul karena terdapat konflik perbedaan pendapat (kepentingan) antara pemilik (*principle*) dengan manajemen (*agent*).

Menurut Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik (*principle*) melalui

peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (*agent*) akan mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya.

Einsenhardt (1989) dalam Triyuwono (2018) menyatakan bahwa teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rational*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko.

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi juga dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan (*principle*), sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principle*. Manajer (*agent*) bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan perusahaan. Adanya asimetri informasi antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan mempengaruhi angka-angka laporan yang disajikan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Manajemen (*agent*) bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada pemilik (*principle*) seolah-olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataannya tidak demikian. Ketidaktahuan pemilik (*principle*) memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan

manajemen laba (memanipulasi laporan keuangan) untuk kepentingan dirinya sendiri.

Munculnya masalah agensi disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan atau *cost agency* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk memastikan manajemen berperilaku tidak merugikan pemegang saham dan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principle*). Pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen (*agent*) adalah pelaku utama dalam teori agensi, mereka mempunyai nilai tawar yang sama tinggi dalam peran dan kedudukan. Masalah keagenan dan biaya-biaya yang muncul pada teori keagenan bisa ditekan sedemikian rupa mulai dari pertama kali hendak melakukan kontrak antara pemegang saham dan manajemen. Kontrak kerjasama harus disusun dengan jelas.

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat pengendali konflik kepentingan pihak-pihak yang terkait dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang semestinya atas investasi mereka terhadap perusahaan.

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola Perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas (Wikipedia, 2020).

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan *Good Governance*. Berdasarkan Pedoman *Corporate Governance* dari Komite Nasional *Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) prinsip-prinsip *Corporate Governance* antara lain:

1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar:

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar:

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip Dasar:

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar:

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar:

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajemen yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. Manajemen memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, sehingga dalam menjalankan tanggungjawabnya akan cenderung melakukan hal yang terbaik.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen cenderung lebih giat dalam bekerja apabila proporsi kepemilikan lebih banyak dimiliki oleh manajemen, karena tidak lain manfaatnya akan didapat oleh dirinya sendiri. Dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajemen, maka manajer lebih berleluasa dalam mengatur keputusan dan kebijakan untuk perusahaan. Kebijakan yang dapat ditentukan secara leluasa antara lain metode akuntansi dan keputusan terkait masa depan perusahaan. Hal menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajemen dengan integritas laporan keuangan. Peningkatan atas kepemilikan manajemen akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen

akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengurangi risiko kerugian perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari sebuah perusahaan oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Darmayanti et al., 2018). Pengaruh kepemilikan institusional ditekan atau dikendalikan oleh besarnya investasi dalam suatu perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam mengurangi atau meminimalisir konflik keagenan yang dapat terjadi antara pemegang saham selaku prinsipal dan manajer selaku agen. Kepemilikan institusional dapat diukur dari persentase kepemilikan institusional terhadap total saham beredar.

2.1.5 Dewan Komisaris independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen menurut Peraturan Bursa Efek Jakarta keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui

peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (*Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000*)

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan

komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007).

Yuliani (2018) menyatakan, tugas dari komisaris independen diantaranya:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Tugas dewan komisaris independen adalah mengawasi jalannya organisasi atau perusahaan dengan menetapkan prinsip transparansi bagi seluruh pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Keberadaan komisari independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

2.1.6 Komite Audit

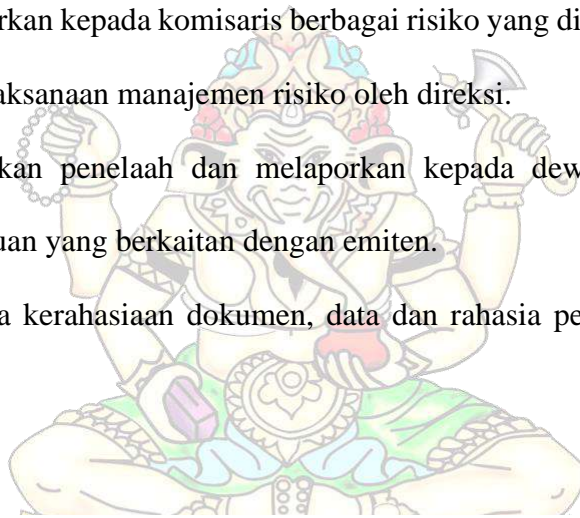
Komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Komite audit membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal dan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya (Gayatri dan Suputra, 2013).

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (Yuliani, 2018).

Tugas komite audit antara lain:

- a. Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e. Melakukan penelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan (Yuliani, 2018).



2.1.7 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility(CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (endiana, 2019). The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka,

keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan beberapa tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan tersebut mengharuskan suatu PT untuk memuat dan mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan, karena laporan tahunan merupakan media komunikasi informasi tentang posisi keuangan dan kinerja aktivitas pendapat, pembiayaan, dan laba-rugi perusahaan pada suatu periode kepada *stakeholder*. Dari laporan para *stakeholder* dapat menilai kekuatan, kelemahan, prospek, resiko, dan berkelanjutan suatu perusahaan sebelum mereka mengambil suatu keputusan. Pedoman yang sebelumnya mereka mengambil suatu keputusan. Pedoman yang sebelumnya mereka mengambil suatu keputusan. Pedoman yang digunakan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* salah satunya adalah pedoman berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan yang berbasis organisasi yang menghasilkan kerangka kerja laporan berkelanjutan secara lengkap untuk dapat digunakan diseluruh dunia. GRI juga merupakan sebuah komite/panitia untuk memperbaiki kerangka kerja secara berkesinambungan dan dapat diaplikasikan di seluruh dunia. Tujuan utama

GRI meliputi penggunaan lingkungan, social, dan kinerja perusahaan. Adapun tiga focus pengungkapan CSR berdasarkan GRI (GRI, 2011) antar lain:

- 1) Indikator kinerja ekonomi.
- 2) Indikator kinerja lingkungan
- 3) Indikator kinerja sosial, yang terdiri dari (tenaga kerja, HAM, sosial, tanggung jawab produk)



2.1.8 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah proses yang telah dilalui oleh suatu perusahaan untuk pandangan dari kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan prospek masa depannya dapat dipercaya oleh investor (Pambudi and Ahmad, 2022). Nilai perusahaan juga tercermin dari harga saham, dimana jika harga saham menurun maka nilai perusahaan menurun, sehingga hal ini berdampak pada penurunan kemakmuran pemegang saham dan sebaliknya apabila semakin tinggi harga saham maka nilai perusahaan juga semakin tinggi sehingga semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham. Maka nilai perusahaan menjadi hal yang penting bagi para pemegang saham.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan *profitabilitas* (Yanti and Darmayanti, 2019). Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran

dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Sari and Mildawati, 2017).

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Price to Book Value* (PBV), rasio ini mengukur nilai yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan untuk melihat perkembangan suatu perusahaan. PBV merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh investor dalam menilai perusahaan. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya memiliki rasio PBV diatas satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya.

2.2 Hasil penelitian sebelumnya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Belliana dan Budiyanto (2018) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating”. Menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Serta kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sa'diyah, 2018) yang berjudul *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Profitabilitas* sebagai variabel Moderating. Mendapat kesimpulan bahwa

Corporate Social Responsibility (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Pengungkapan CSR sebuah perusahaan belum tentu dapat meningkatkan nilai perusahaannya dan perusahaan yang tidak mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* belum tentu memiliki nilai perusahaan yang rendah. Sedangkan Profitabilitas (X2), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hanif, dkk 2019) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan dan *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan *Food And Beverage* di BEI”. Menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, 2019) Penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam peringkat II CGP, di pilih melalui *purposive sampling* teknik. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan deskriptif teknik analisis dan uji asumsi klasik; Uji F dan Uji t. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, serta pengungkapan CGC dan CSR memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak CSR memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizky dan Ceacilia ,2022). Yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2018-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 234 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Zulaikha, 2021), dengan judul pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Penelitian ini

menggunakan metode *purposive sampling* untuk mengumpulkan data. Data tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Sampel akhir dari penelitian ini adalah 46 perusahaan dengan 205 laporan tahunan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dari tahun 2015 hingga 2019. Data ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang berarti.

Hasil penelitian yang dilakukan (Juliawan, dkk 2023). Dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2021, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan CSR pada Nilai Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan mengambil sampel sebanyak 138 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan sedangkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen tidak

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2019-2021.

Hasil penelitian yang dilakukan (Amaliyah dan Herwiyanti 2019). Dengan judul Pengaruh Kepemilikan Instisional, Dewan Komisaris independen, Dan Komite audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data website BEI. Sampel yang digunakan berjumlah 60 perusahaan sektor pertambangan selama 2 tahun periode pengamatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah keberadaan komite audit mempunyai peran yang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui kualitas komite audit. Sedangkan untuk kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kustiono dan Sherin 2020). Dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social*

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Dan Stock *Exchange* Of Thailand Periode 2016-2018. Populasi data yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu 23 perusahaan dan yang terdaftar di SET yaitu 20 perusahaan Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis data menggunakan analisis regresi, ansumsi klasik serta uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan CSR di Indonesia dan di Thailand berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial, ditunjukkan bahwa kepemilikan manajerial di Indonesia dan komite audit di Thailand berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan di Thailand kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sonia dan Magdalena 2022), yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yang terdiri dari 155 perusahaan. Pengambilan sampel yang berjumlah 55 perusahaan dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instisional dan Dewan Komisaris independen secara simultan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara secara parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan, tetapi Kepemilikan Instisional dan Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. CSR mampu memoderasi Kepemilikan Manajerial dan CSR berpotensi memoderasi Kepemilikan Instisional dan Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. CSR mampu memperkuat hubungan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instisional dan Dewan Komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari 2021). Yang berjudul menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 63 data dari 21 perusahaan yang menjadi sampel selama periode 3 tahun. Alat analisis data utama yang digunakan adalah RLB yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saputri dan Isbanah 2021). Yang berjudul pengaruh *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai

variabel mediasi pada perusahaan miscellaneous industry di BEI periode 2016-2019. Objek penelitian adalah 19 perusahaan terpilih di berbagai sektor industri, dengan jumlah data 76 laporan tahunan yang memenuhi kriteria. Alat analisis utama yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) yang menemukan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Komite audit dan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuryono 2019). Yang berjudul pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit pada nilai perusahaan. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 63 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data utama yang digunakan adalah RLB yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel bebas lainnya (kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ritama 2021) menganalisis tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Populasi penelitian berjumlah 109 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel penelitian sebanyak 37 perusahaan yang diperoleh dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data utama yang digunakan adalah RLB yang menemukan

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati 2021) menganalisis tentang pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan ditemukan 8 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik analisis data utama yang digunakan adalah regresi sederhana yang menemukan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

